

Research Article



Perempuan dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029

Angelita Epiphania Rnh^{1*}, Marlan Hutahaean², Artha Lumban Tobing³.

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia

* angelita.epiphania@sudent.uhn.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan politik dan dinamika politik yang dialami oleh anggota DPR RI perempuan periode 2014-2019 hingga 2024-2029. Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem patriarki serta kekerasan politik yang dihadapi oleh perempuan dalam keterlibatannya di bidang politik. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem patriarki dan kekerasan politik masih menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP) yang telah dipaparkan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik Indonesia dan untuk mendorong upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam politik.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Politik (VAWP), Patriarki, DPR RI Perempuan

Abstract: This research discusses the forms of political violence and the political dynamics experienced by female members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the 2014-2019 period to 2024-2029. The study examines the influence of the patriarchal system and the political violence faced by women in their involvement in politics. The research method employed is qualitative research, with data obtained through literature studies. The findings indicate that the patriarchal system and political violence continue to pose significant barriers to women's participation in politics. This is evident from the various forms of violence against women in politics (VAWP) that have been outlined. The contribution of this research is to provide a deeper understanding of the challenges faced by women in Indonesian politics and to encourage effort for women's empowerment in this field.

Keywords: Violence Against Women in Politics (VAWP), Patriarchy, Female DPR RI Members

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi dan kesetaraan gender. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk sistem patriarki yang membatasi peran mereka dalam politik (Umaimah et al., 2024). Salah satu hambatan utama adalah kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP), yang mencakup diskriminasi struktural, ancaman, pelecehan, hingga pemaksaan pengunduran diri dari jabatan (Bardall et al., 2020). Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan efek jera bagi perempuan lain yang ingin berpartisipasi dalam politik (Krook & Sanín, 2017).

Meskipun kebijakan afirmatif seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah diberlakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala. Perempuan sering kali hanya dijadikan pelengkap administratif tanpa dukungan nyata dalam karier politik mereka (Kadriyah, 2023). Selain itu, stereotip gender yang menganggap perempuan lebih cocok dalam ranah domestik masih kuat

di masyarakat, sehingga mempersempit peluang mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Halizah & Faralita, 2023; Swari, 2023).

VAWP semakin menjadi perhatian di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan politik terhadap perempuan. Contohnya, Ratu Ngadu Bona Wulla, calon legislatif dari Partai NasDem, mengundurkan diri secara tiba-tiba meskipun memperoleh suara lebih tinggi dari pesaingnya. Banyak pihak menduga bahwa pengunduran dirinya disebabkan oleh tekanan politik (detikcom, 2024; Kompas, 2024). Kasus serupa terjadi pada Anna Mu'awanah, mantan Bupati Bojonegoro, yang batal mencalonkan diri karena keputusan mendadak dari partainya (Perdana, 2024).

Selain tekanan politik, bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan dalam politik mencakup pelecehan verbal dan kampanye hitam, yang sering kali disebarluaskan melalui media sosial (Sanín, 2020; Schumann, 2020). Kekerasan ini berdampak besar terhadap kualitas demokrasi, karena membatasi partisipasi perempuan dan mempengaruhi kebijakan publik yang dihasilkan. Semakin sedikit perempuan yang terlibat dalam politik, semakin sulit bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada gender (Aula, 2023).

Menurut (News, 2024), kekerasan terhadap perempuan dalam politik berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Ketakutan akan ancaman membuat banyak perempuan enggan terlibat dalam politik, sehingga memperkuat dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis. Rendahnya representasi perempuan dalam politik juga berdampak pada kebijakan yang kurang berpihak pada perempuan (Nursyifa et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan politik yang dialami perempuan, menganalisis faktor-faktor yang memperkuat praktik VAWP, serta memahami dampaknya terhadap partisipasi perempuan dan kualitas demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam politik (Tamrin, 2024). Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi untuk mengurangi kekerasan politik terhadap perempuan dan meningkatkan keterwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam politik (violence against women in politics atau VAWP) serta dampaknya terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap pengalaman perempuan dalam dunia politik dan bagaimana mereka menghadapi tantangan struktural serta kekerasan politik yang menghambat partisipasi mereka (Creswell, 2013). Penelitian ini menyoroti pola kekerasan politik yang terjadi dalam tiga periode kepemimpinan DPR RI, yaitu 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.

Menurut (Umaimah et al., 2024), sistem patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia berdampak signifikan terhadap peran perempuan dalam politik, baik dalam bentuk hambatan struktural maupun praktik kekerasan langsung yang membuat perempuan sulit untuk mencapai posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif sangat relevan untuk memahami bagaimana kekerasan politik terhadap perempuan terjadi, mekanisme yang memperkuatnya, serta dampak jangka panjangnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan fokus utama pada anggota DPR RI perempuan selama tiga periode terakhir di kantor DPR RI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Februari 2025, dengan tahap pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi selama periode tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai sumber terpercaya seperti:

1. Jurnal akademik yang membahas isu gender, keterwakilan perempuan, dan kekerasan dalam politik, seperti penelitian (Aula, 2023) mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia serta studi (Swari, 2023) tentang bagaimana budaya patriarki mempengaruhi kebebasan berekspresi perempuan dalam politik.
2. Laporan dan publikasi dari organisasi terkait, termasuk laporan dari media nasional dan internasional yang membahas kasus kekerasan politik terhadap perempuan. Misalnya, (News, 2024) melaporkan bagaimana kekerasan dalam politik berdampak pada penurunan kualitas demokrasi.
3. Berita investigatif dari media massa, yang mengungkap kasus kekerasan terhadap politisi perempuan, seperti pengunduran diri mendadak Ratu Ngadu Bona Wulla dari Partai NasDem setelah memenangkan suara signifikan (detikcom, 2024) dan kasus Anna Mu'awanah yang dilarang maju dalam Pilkada oleh partainya sendiri (Perdana, 2024).
4. Dokumen kebijakan dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen dan peraturan terkait perlindungan terhadap politisi perempuan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, berita, dokumen hukum, serta laporan lembaga pemerintah dan organisasi independen. Beberapa langkah dalam teknik pengumpulan data ini meliputi: Menelusuri jurnal akademik dan artikel ilmiah yang membahas topik keterwakilan perempuan dan kekerasan dalam politik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang telah dikemukakan oleh (Creswell, 2013), yang terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Pengorganisasian dan penyiapan data – Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan kategori seperti periode politik, bentuk kekerasan politik, dan dampak terhadap keterwakilan perempuan.
2. Membaca dan memahami seluruh data – Pemahaman menyeluruh tentang tema-tema yang muncul dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Melakukan koding data – Informasi dari berbagai sumber dikategorikan ke dalam tema tertentu, seperti bentuk kekerasan politik (ancaman, pelecehan, pemaksaan pengunduran diri), dampak terhadap partisipasi perempuan, serta respon dari partai politik dan masyarakat.

4. Menghubungkan antar tema – Identifikasi hubungan antara tema dianalisis dan faktor yang mempengaruhinya.
5. Memberikan interpretasi dan makna terhadap temuan penelitian – Interpretasi hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Pemilu 1999 - Pemilu 2024

Berdasarkan data dari Perludem (2024), jumlah perempuan di DPR RI meningkat dari 45 orang (9,0%) pada Pemilu 1999 menjadi 128 orang (22,1%) pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, jumlah ini masih belum mencapai target 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang telah ditetapkan oleh kebijakan afirmatif (Kahpi, 2024).

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dalam Pemilu 1999 - Pemilu 2024

No	Pemilu	Jumlah	Persen
1	1999	45	9,0%
2	2004	61	11,1%
3	2009	101	18,0%
4	2014	97	17,3%
5	2019	118	20,5%
6	2024	128	22,1%

Sumber: Perludem, 2024

Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada Pemilu 2009, di mana jumlah perempuan di DPR RI naik menjadi 101 orang (18,0%) dari 560 kursi yang tersedia. Hal ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, meskipun hasil akhirnya belum mencapai persentase tersebut (Kadriyah, 2023).

Namun, pada Pemilu 2014, jumlah perempuan di DPR RI mengalami sedikit penurunan menjadi 97 orang (17,3%). Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (Bardall et al., 2020; Krook & Sanín, 2017). Tren positif kembali terlihat pada Pemilu 2019, di mana keterwakilan perempuan meningkat menjadi 118 orang (20,5%), serta pada Pemilu 2024 yang mencapai angka 128 orang (22,1%), yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah keterwakilan perempuan di DPR RI (Kahpi, 2024).

Meskipun angka keterwakilan perempuan meningkat, berbagai hambatan masih dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Kekerasan terhadap perempuan dalam politik (Violence Against Women in Politics/VAWP), diskriminasi gender, serta struktur politik yang masih didominasi oleh laki-laki menjadi tantangan utama yang harus diatasi

(Tamrin, 2024; Umaimah et al., 2024). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI harus diiringi dengan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak politik perempuan serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif (Swari, 2023; Syahra et al., 2024).

VAWP Periode 2014-2019

Berdasarkan berbagai sumber, bentuk kekerasan politik yang paling dominan terjadi pada periode ini adalah kekerasan simbolis dan kekerasan psikologis, yang bertujuan untuk merusak reputasi perempuan dalam politik dan menghambat karier politik mereka (Bardall et al., 2020; Sanín, 2020).

Tabel 2. VAWP Periode 2014-2019

No	Nama	Periode	Bentuk Kekerasan	Keterangan Kekerasan
1	Dr. Ari Yusnita	2014-2019	Simbolis	Tuduhan pelanggaran pemilu
2	Linda Megawati	2014-2019	Psikologis	Tuduhan pemerasan

Sumber: Pengolahan Data, 2025

Dr. Ari Yusnita mengalami kekerasan simbolis berupa tuduhan pelanggaran pemilu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan dirinya sebagai politisi perempuan. Tuduhan ini menunjukkan bagaimana sistem patriarki dalam politik cenderung lebih mudah mengkriminalisasi perempuan yang memiliki status politik yang kuat (Tarakan, 2025).

Linda Megawati, anggota Komisi XI DPR, mengalami kekerasan psikologis berupa tuduhan pemerasan yang mencoreng citranya sebagai politisi perempuan (Kompas, 2012). Tuduhan ini muncul setelah pertemuan antara anggota Komisi XI dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada 1 Oktober 2012, di mana Linda dituduh meminta upeti dari pihak direksi MNA.

Namun, Achsanul Qosasih menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal dan hanya membahas business plan yang diajukan oleh direksi MNA (Kompas, 2012). Linda Megawati sendiri membantah tuduhan tersebut dalam rapat klarifikasi yang diadakan oleh Badan Kehormatan DPR, dan akhirnya pada 14 Desember 2012, pimpinan DPR menyatakan bahwa Linda tidak terbukti melanggar kode etik (RMOL.ID, 2012).

VAWP Periode 2019-2024

Pada periode 2019-2024, kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP) di Indonesia terus menjadi isu yang mencuat. Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat, mereka tetap menghadapi berbagai bentuk kekerasan politik, terutama kekerasan simbolis dan kekerasan psikologis (Bardall et al., 2020; Sanín, 2020). Dua kasus yang menonjol pada periode ini adalah yang dialami oleh Renny Astuti dan Riezky Aprilia, yang menjadi korban ketidakadilan politik serta tekanan psikologis untuk mundur dari jabatannya (Kompas, 2022; Inilah.com, 2025).

Tabel 3. VAWP Periode 2019-2024

No	Nama	Periode	Bentuk Kekerasan	Keterangan Kekerasan
1	Renny Astuti	2019-2024	Simbolis	Pelanggaran prosedural dalam pemberhentiannya
2	Riezky Aprilia	2019-2024	Psikologis	Intimidasi

Sumber: Pengolahan Data, 2025

Renny Astuti, mantan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, mengalami kekerasan simbolis dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya yang tidak sesuai prosedur dan dianggap cacat hukum (Kompas, 2022). Renny mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mendapati bahwa dirinya diberhentikan tanpa adanya kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Dalam peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa setiap anggota DPR yang akan diberhentikan berhak memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil. Namun, Renny mengaku bahwa dirinya tidak pernah dipanggil oleh DPP Partai Gerindra untuk membahas pemberhentiannya (Kompas, 2022). Kasus ini mencerminkan bagaimana kekerasan simbolis dalam politik sering kali dilakukan dengan cara-cara prosedural yang tidak adil, yang mengarah pada marginalisasi perempuan dalam politik.

Riezky Aprilia mengalami kekerasan psikologis berupa intimidasi politik setelah mendapatkan kursi DPR RI sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Kasusnya menjadi perhatian setelah adanya upaya dari Hasto Kristiyanto dan pihak terkait untuk menggantikan Riezky dengan Harun Masiku (Inilah.com, 2025). Ketika Riezky menolak untuk mundur, sekretaris jenderal PDIP bahkan menahan surat pelantikannya, yang merupakan hak sahnya sebagai anggota DPR RI. Ketika tekanan ini tidak berhasil, terjadi upaya suap yang dilakukan oleh Saeful Bahri dan advokat PDIP kepada eks-Komisioner KPU agar kursi tersebut dialihkan ke Harun Masiku (Inilah.com, 2025). Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan politik dan praktik korupsi dapat digunakan sebagai alat kekerasan psikologis untuk menghambat perempuan dalam politik. Riezky yang seharusnya memiliki hak politik penuh sebagai anggota DPR RI justru diperlakukan secara tidak adil, hanya karena ada kepentingan politik tertentu yang ingin menyingkirkannya.

VAWP Periode 2024-2029

Meskipun keterwakilan perempuan dalam DPR RI mencapai angka tertinggi dalam sejarah pada Pemilu 2024 dengan 128 anggota perempuan (22,1%), fenomena Violence Against Women in Politics (VAWP) tetap menjadi isu yang menghambat partisipasi mereka secara penuh (Kahpi, 2024). Kekerasan yang terjadi pada periode ini didominasi oleh kekerasan simbolis dan kekerasan seksual, yang mencerminkan masih kuatnya tantangan struktural dan budaya patriarki dalam dunia politik (Halizah & Faralita, 2023; Krook & Sanín, 2017).

Tiga kasus menonjol dalam periode ini adalah yang dialami oleh Melati Erzaldi, Dr. Hj. Anna Mu'awanah, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang masing-masing mengalami bentuk kekerasan politik yang berbeda (Perdana, 2024).

Tabel 4. VAWP Periode 2024-2029

No	Nama	Periode	Bentuk Kekerasan	Keterangan Kekerasan
1	Melati Erzaldi	2024-2029	Simbolis	Tuduhan pelanggaran pemilu
2	Dr. Hj. Anna Mu'awanah	2024-2029	Simbolis	Pelarangan mencalonkan diri
3	Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	2024-2029	Seksual	Pelecehan seksual

Sumber: Pengolahan Data, 2025

Melati Erzaldi mengalami kekerasan simbolis berupa tuduhan pelanggaran pemilu terkait penggunaan kendaraan operasional milik pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam acara Tabligh Akbar. Tuduhan ini dilayangkan oleh Bawaslu Bangka Belitung, yang mengklaim bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye politik ([Salinan Putusan Perkara 94 Tahun 2024 Bangka Belitung, 2024](#)). Kasus ini menggambarkan bagaimana media dan institusi hukum dapat digunakan sebagai alat kekerasan simbolis untuk menciptakan stigma negatif terhadap perempuan dalam politik. Tuduhan ini berpotensi merusak reputasi politik Melati dan membatasi ruang gerakannya dalam pemilu mendatang.

Dr. Hj. Anna Mu'awanah, anggota DPR RI dan mantan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023, mengalami kekerasan simbolis berupa pelarangan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Keputusan ini terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tempatnya bernaung, mencabut dukungan kepadanya dan memilih mendukung kandidat lain, Setyo Wahono-Nurul Azizah, yang memiliki kedekatan dengan elite politik nasional ([DetikJatim, 2024](#)).

Menurut laporan DetikJatim (2024), Anna menyatakan bahwa ia menerima keputusan ini dengan damai dan lapang dada, tetapi hal ini tetap menunjukkan bagaimana perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan besar, termasuk dari dalam partainya sendiri.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai aktivis dan politisi, mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan verbal di media sosial. Pelecehan ini terjadi setelah sebuah foto dirinya dalam pakaian olahraga menjadi viral dan menjadi sasaran komentar tidak pantas dari beberapa tokoh politik ([Kompas, 2020](#)). Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam politik bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang digital, yang dapat mengintimidasi perempuan dan menghambat mereka untuk lebih aktif dalam politik.

Keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024, tetapi partisipasi mereka masih dihambat oleh berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP), seperti kekerasan simbolis, psikologis, dan seksual ([Bardall et al., 2020](#); [Krook & Sanín, 2017](#)). Kekerasan simbolis sering kali terjadi dalam bentuk tuduhan hukum atau pencabutan dukungan politik, seperti yang dialami oleh Melati Erzaldi dan Dr. Hj. Anna Mu'awanah, yang dicap melanggar aturan pemilu atau dilarang mencalonkan diri tanpa alasan jelas ([Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024](#); [DetikJatim, 2024](#)). Kekerasan psikologis berupa intimidasi dan tekanan politik dialami oleh Riezky Aprilia, yang dipaksa menyerahkan kursinya kepada Harun Masiku (Inilah.com, 2025), sedangkan kekerasan seksual menimpa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menjadi korban pelecehan verbal

akibat unggahan fotonya di media social (Kompas, 2020). Kekerasan ini menunjukkan bahwa politik masih didominasi budaya patriarki, di mana perempuan dianggap ancaman bagi struktur kekuasaan yang ada (Tamrin, 2024). Menurut CNN Indonesia (2025), 82% perempuan yang aktif dalam politik mengalami kekerasan, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi (News, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural yang mencakup penguatan regulasi, perlindungan hukum, peran partai politik yang lebih inklusif, serta kampanye kesadaran publik, agar perempuan dapat berpartisipasi secara aman dan setara dalam politik (Swari, 2023; Umaimah et al., 2024). Jika kekerasan ini terus dibiarkan, maka peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hanya akan menjadi angka tanpa makna, karena mereka tetap tidak dapat menjalankan perannya secara bebas dan independen (CNN Indonesia, 2025).

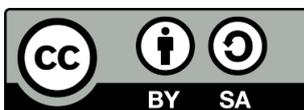
PENUTUP

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dari studi literatur, sehingga tidak menggambarkan secara mendalam pengalaman spesifik anggota DPR RI perempuan yang mengalami kekerasan politik (Sugiyono, 2020). Dalam konteks politik Indonesia, hambatan yang dihadapi perempuan sering kali berakar pada sistem patriarki yang menghambat partisipasi mereka secara penuh (Sulfiana et al., 2023; Syahra et al., 2024). Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun lingkungan politik yang aman dan inklusif, sebagaimana disarankan oleh (Tamrin, 2024; Umaimah et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Bardall, G., Bjarnegård, E., & Piscopo, J. M. (2020). How is Political Violence Gendered? Disentangling Motives, Forms, and Impacts. *Political Studies*, 68(4), 916–935. <https://doi.org/10.1177/0032321719881812>
- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- detikcom. (2024). Profil Ratu Wulla NasDem yang Suaranya Kalahkan Viktor Laiskodat lalu Mundur. detikcom. <https://news.detik.com/pemilu/d-7241064/profil-ratu-wulla-nasdem-yangsuaranya-%0Akalahkan-viktor-laiskodat-lalu-mundur>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Inilah.com. (2025). KPK Panggil Riezky Aprilia , Korban Hasto di Kasus Suap PAW Harun Masiku. Inilah.com. <https://www.inilah.com/kpkpanggil-%0Ariezky-aprilia-korban-hasto-di-kasus-suap-paw-harun-masiku>
- Kadriyah, S. M. (2023). Women's Representation and Accessibility in Indonesian Politics: A Study of Jakarta Regional People's Representative Council. *Jurnal Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v9i2.1154>
- Kahpi, M. L. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 64–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067>
- Kompas. (2012). Linda Megawati: Saya Terpukul Disebut Pemerias. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/28/11385519/artikel-detaillkomentar-%0Amobile.html>
- Kompas. (2020). Sara Djojohadikusumo: Pelecehan Seksual yang Saya Alami Hanya Miniatur

- dari Korban. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/15052991/saradjojohadikusumo-%0Apelecehan-seksual-yang-saya-alami-hanya-miniatur-dari>
- Kompas. (2024). Masyarakat Sumba Duga Ratu Wulla Dipaksa dan Diancam Mundur.
- Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2017). Violence Against Women in Politics A Defense of the Concept. *Journal of Democracy*, 23(2), 495–490. <https://doi.org/10.1353/jod.2017.0007>
- News, A. (2024). Kekerasan pada perempuan di Pilkada berdampak turunkan mutu demokrasi. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4450541/kekerasan-pada-perempuandi-%0Apilkada-berdampak-turunkan-mutu-demokrasi>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachmani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 9(1), 25–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Perdana, D. (2024). Pupus Harapan Anna Muawanah Jadi Bupati 2 Periode Usai PKB Cabut Kekom. *detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7515770/pupus-harapan-annamuawanah-%0Ajadi-bupati-2-periode-usai-pkb-cabut-rekom>
- Salinan Putusan Perkara 94 Tahun 2024 Bangka Belitung (2024).
- Sanín, J. R. (2020). Violence against women in politics: Latin america in an era of backlash. *Signs*, 45(2), 302–310. <https://doi.org/10.1086/704954>
- Schumann, M. (2020). Violence against Women in Politics a Growing Problem. *Politics and Gender*.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. In Alfabeta. Alfabeta.
- Sulfiana, Syukur, M., & Ahmad, R. S. (2023). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>
- Swari, P. R. (2023). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekrasi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>
- Syaha, D., Maulidia, K., & Khikmawanto, K. (2024). Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Politik di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 889–893. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1540>
- Tamrin, S. (2024). Patriarki Berkedok Tubuh Perempuan: Sebuah Analisis Feminis. *Jurnal Perspektif*, 7(2), 301–310. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i2.858>
- Tarakan, R. (2025). Terbukti, dr. Ari Tidak Melakukan Pelanggaran Pemilu. *Radar Tarakan*.
- Umaimah, Zainudin, M. Z., Sumardi, E., Akbar, M., & Putra, R. D. (2024). Unveiling the Hidden Struggles: Political Violence Against Women Through the Lens of Standpoint Theory. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(2), 171–198.



Copyright (c) 20xx by the authors. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).